



## Governance Transnasional Tahta Suci dalam Tata Kelola Dunia Multipolar: Analisis Kelembagaan, Instrumen Kebijakan, dan Otoritas Moral

Obi Pratama<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup> Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis,  
Universitas Wanita Internasional

<sup>2</sup> Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Humaniora dan Bisnis,  
Universitas Satyagama

Email: [obipratama@iwu.ac.id](mailto:obipratama@iwu.ac.id), [obipratama09@gmail.com](mailto:obipratama09@gmail.com)

### Abstract

*The legitimacy crisis of state-centric global governance in a contemporary multipolar world demands the emergence of alternative non-territorial actors. The Holy See stands out as an institutional anomaly, operating as a resilient transnational governance apparatus without relying on military or economic coercive instruments. This study aims to analyze the bureaucratic anatomy and effectiveness of the Holy See's global policy implementation through the theoretical lenses of Network Governance, Transnational Public Administration, and Institutional Legitimacy (lex imperfecta). A qualitative approach utilizing a single instrumental case study design was employed. Secondary data, including papal encyclicals (Laudato Si' and Fratelli Tutti), official diplomatic archives, and contemporary institutional developments up to 2026, were analyzed using Qualitative Document Analysis integrated with the Institutional Analysis Framework. The findings reveal that the Roman Curia functions as a transnational rational-legal bureaucratic machine that combines centralized policy formulation with network-based decentralized execution via the principle of subsidiarity. Papal encyclicals act as substantive transnational policy papers capable of shaping global regulatory agendas, as demonstrated by the Holy See's ethics intervention regarding Artificial Intelligence (AI) at the G7 Summit. Policy compliance is secured by converting moral authority into structural power, reinforced by sophisticated governance communication—such as the formal integration of the Indonesian language into Vatican News in 2026 to consolidate its network in the Indo-Pacific region. This study offers a radical novelty by expanding the locus of Public Administration and Governance disciplines beyond domestic-territorial boundaries.*

**Keywords:** Holy See, Moral Authority, Multipolar World, Network Governance, Transnational Public Administration.

### **Abstrak**

*Krisis legitimasi tata kelola global berbasis negara dalam tatanan dunia multipolar menuntut kehadiran aktor alternatif non-teritorial. Tahta Suci muncul sebagai anomali institusional yang beroperasi sebagai aparatus tata kelola transnasional yang andal tanpa bersandar pada instrumen koersif militer atau ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis anatomi birokrasi dan efektivitas implementasi kebijakan global Tahta Suci menggunakan pisau analisis teori Tata Kelola Jaringan (Network Governance), Administrasi Publik Transnasional, dan Legitimasi Kelembagaan (lex imperfecta). Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus instrumental tunggal. Data sekunder berupa Ensiklik kepausan (Laudato Si' dan Fratelli Tutti), dokumen diplomatik resmi, dan dinamika kelembagaan mutakhir tahun 2026 dianalisis menggunakan teknik Analisis Dokumen Kualitatif yang diintegrasikan dengan Kerangka Analisis Institusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kuria Roma berfungsi sebagai mesin birokrasi rasional-legal transnasional yang mengombinasikan formulasi kebijakan terpusat dengan desentralisasi berbasis jaringan melalui prinsip subsidiaritas. Dokumen Ensiklik bertindak sebagai instrumen kebijakan publik transnasional substantif (policy papers) yang mampu memengaruhi agenda regulasi dunia, seperti intervensi etika Kecerdasan Buatan (AI) pada KTT G7. Kepatuhan kebijakan (policy compliance) dicapai melalui utilisasi otoritas moral sebagai kekuasaan struktural, yang diperkuat oleh kecanggihan komunikasi pemerintahan (governance communication) berupa integrasi Bahasa Indonesia pada Vatican News tahun 2026 untuk memperluas jangkauan jaringan di kawasan Indo-Pasifik. Penelitian ini memberikan kontribusi kebaruan radikal dengan memperluas lokus disiplin Ilmu Pemerintahan melampaui batas domestik-teritorial negara-bangsa, sekaligus menyediakan fondasi konseptual makro bagi studi tata kelola transnasional masa depan.*

**Kata Kunci:** *Administrasi Publik Transnasional, Dunia Multipolar, Otoritas Moral, Tahta Suci, Tata Kelola Jaringan.*

### **PENDAHULUAN**

Tatanan global kontemporer tengah menghadapi krisis legitimasi dan fragmentasi otoritas yang signifikan seiring transisi menuju arsitektur dunia multipolar. Sistem multilateral berbasis negara (*state-centric*) yang selama ini menjadi tulang punggung tata kelola global terbukti semakin gagap dalam merespons ancaman multidimensi, mulai dari krisis ekologis yang mendesak hingga konflik geopolitik yang terus bereskalasi. Rivalitas hegemonik antarnegara sering kali berujung pada kelumpuhan institusi internasional formal, di mana kalkulasi kepentingan nasional secara pragmatis menundukkan nilai-nilai kemanusiaan universal. Kondisi yang mengkhawatirkan ini ditegaskan secara eksplisit dalam pidato tahunan Kepausan di hadapan korps diplomatik global, yang menyoroti bahwa dunia saat ini sedang terperangkap dalam tren regresif yang melegitimasi kekerasan sebagai

instrumen utama politik. Hal ini secara langsung memunculkan kebutuhan mendesak akan aktor tata kelola global alternatif yang tidak terikat oleh batas teritorial kaku maupun geopolitik berbasis militer, melainkan institusi yang mampu bertindak sebagai penyeimbang moral di tengah anarki sistem tata kelola internasional (Vatican Official Archive, 2026).

Dalam diskursus keilmuan Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik, kebuntuan institusi formal negara ini menandai perlunya rekonseptualisasi yang radikal terhadap ruang lingkup administrasi dari yang awalnya bersifat domestik-teritorial menjadi lintas batas. Konsep administrasi negara tradisional yang selalu bertumpu pada otoritas hierarkis pemerintah pusat kini telah bergeser kuat ke arah tata kelola jaringan (*network governance*) dan administrasi publik transnasional. Pembuatan kebijakan publik dewasa ini tidak lagi dimonopoli oleh aparatus birokrasi negara secara tunggal, melainkan secara aktif melibatkan komunitas kebijakan transnasional yang berjejaring untuk menciptakan standar etika di area-area yang mengalami kekosongan otoritas pemerintahan (*limited stateness*). Pergeseran paradigma ini menuntut analisis tajam terhadap aktor-aktor birokrasi non-negara yang beroperasi secara global, yang secara empiris memiliki kapasitas luar biasa dalam merumuskan, mendistribusikan, dan memengaruhi kebijakan transnasional tanpa sedikitpun bersandar pada instrumen kekerasan yang sah. Tata kelola pemerintahan masa depan menuntut sinergi jejaring institusi yang inklusif demi menjamin keberlakuan regulasi yang bersifat persuasif namun mengikat secara moral (Stone, 2019; Sørensen & Torfing, 2005).

Di tengah fragmentasi arsitektur tata kelola global tersebut, Tahta Suci (*Holy See*) muncul sebagai anomali institusional yang sangat strategis untuk dikaji melalui kaca mata tata kelola pemerintahan dan administrasi publik. Selama berdekade-dekade, institusi Tahta Suci kerap direduksi eksistensinya hanya sebagai entitas keagamaan semata, atau paling jauh hanya dipandang sebagai aktor diplomasi konvensional dalam paradigma ortodoks studi Hubungan Internasional. Faktanya, ditinjau dari realitas administratif dan manajerial, Tahta Suci beroperasi sebagai sebuah aparatus tata kelola transnasional (*transnational governance apparatus*) yang terstruktur masif, memiliki kedaulatan independen yang diakui hukum internasional, dan menjalankan fungsi-fungsi birokrasi layaknya pemerintahan supranasional. Keunikan mendasar Tahta Suci terletak pada kapabilitas operasionalnya di dunia multipolar; institusi ini mengelola infrastruktur birokrasi global yang secara presisi menjangkau nyaris seluruh negara, memengaruhi arah kebijakan publik domestik dan internasional sama sekali tanpa bersandar pada instrumen koersif ekonomi atau militer. Fakta ini menempatkan Tahta

Suci sebagai entitas birokrasi transnasional istimewa yang beroperasi sepenuhnya di atas fondasi otoritas etik dan moral institusional (U.S. Helsinki Commission, 2026).

Efektivitas luar biasa Tahta Suci dalam mengeksekusi fungsi administrasi dan pemerintahan transnasionalnya sangat bergantung pada mekanisme legitimasi moral yang berhasil dikonversi menjadi instrumen kekuasaan normatif. Dalam kerangka teori administrasi publik dan tata kelola kelembagaan, sebuah institusi dapat mencapai tingkat kepatuhan regulasi (*policy compliance*) yang absolut apabila mereka memiliki kapasitas untuk membangun dan mempertahankan legitimasi murni di mata subjek tujuannya. Kekuasaan normatif tanpa senjata ini menjadi modal strategis bagi Tahta Suci dalam mendikte dan memengaruhi perilaku aktor-aktor dominan global, termasuk negara berdaulat, korporasi multinasional, hingga masyarakat sipil di level akar rumput. Otoritas moral dalam konteks kelembagaan ini tidak berhenti sebagai retorika, melainkan direkayasa sebagai sumber kekuasaan struktural yang solid. Melalui struktur legitimasi inilah, setiap panduan tata kelola yang dirumuskan secara terpusat oleh birokrasi Kuria Roma dapat diadopsi dan diimplementasikan secara sukarela oleh aktor lokal di berbagai yurisdiksi, melampaui hambatan kedaulatan hukum positif suatu negara (Hall, 1997; Suchman, 1995).

Manifestasi keandalan aparatus pemerintahan transnasional Tahta Suci tidak hanya dapat diamati dari struktur organisatorisnya, melainkan juga dari produktivitas instrumen kebijakan publik global (*transnational policy output*) yang diciptakannya secara berkala. Dokumen-dokumen resmi kepausan tingkat tinggi, khususnya instrumen Ensiklik seperti *Laudato Si'* yang merumuskan tata kelola lingkungan global dan *Fratelli Tutti* yang merancang arsitektur solidaritas sosial, tidak lagi relevan apabila hanya dipandang sebagai sekumpulan teks teologis. Dari perspektif disiplin administrasi publik transnasional, dokumen-dokumen ini adalah instrumen kebijakan substantif (*policy papers*) yang dirancang secara sistematis oleh kementerian-kementerian di dalam struktur Kuria Roma untuk secara langsung merespons krisis tata kelola nyata. Implementasi kebijakan ini kemudian didistribusikan melalui jalur diplomatik untuk diintegrasikan sebagai panduan pembangunan fundamental di berbagai lembaga dunia, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pembuktian empiris paling mutakhir terkait kapasitas administratif ini adalah keterlibatan eksekutif kepausan dalam mendesain rancangan pedoman etika transnasional untuk tata kelola Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) pada perhelatan strategis KTT G7, yang menegaskan kapabilitas Tahta Suci dalam mendikte diskursus kebijakan publik global pada era disrupsi teknologi terkini (The Interpreter, 2025; Catholic World Report, 2025).

Proses implementasi sebuah kebijakan dari otoritas pusat ke wilayah periferal mutlak membutuhkan infrastruktur komunikasi tata kelola (*governance communication*) yang andal, sehingga arahan strategis di tingkat kelembagaan global tidak mengalami distorsi saat dieksekusi di wilayah operasional lokal. Upaya penguatan kapasitas administrasi transnasional dalam ekosistem masyarakat informasi global mengharuskan adanya adaptasi instrumen komunikasi publik yang secara proaktif merengkuh prinsip multikulturalisme. Hal ini diwujudkan oleh birokrasi Vatikan melalui ekspansi dinamis dari struktur komunikasi kelembagaannya yang terus diselaraskan dengan kekayaan bahasa dari negara target, sebuah taktik untuk mempertajam kohesi jaringan institusi dan menggenjot level akseptabilitas kebijakan (*policy compliance*). Manuver administratif terbaru dalam aspek ini, seperti peresmian Bahasa Indonesia sebagai instrumen bahasa komunikasi formal di dalam struktur Vatican News, tidak boleh dimaknai hanya sebagai adaptasi linguistik standar. Langkah ini sejatinya adalah manuver tata kelola institusional yang dirancang secara strategis untuk mengukuhkan determinasi jaringan administrasi Tahta Suci di sentrum geopolitik kawasan Indo-Pasifik, memosisikan komunikasi publik sebagai infrastruktur mendasar bagi keberhasilan implementasi kebijakan (The Korea Herald, 2026).

Berdasarkan narasi teoretis dan konstelasi empiris di atas, teridentifikasi sebuah celah penelitian (*research gap*) yang mendasar dalam khazanah literatur akademik kontemporer berkenaan dengan analisis kelembagaan Tahta Suci. Diskursus yang berkembang saat ini masih terlampaui tersegmentasi secara sempit; kajian teologi secara absolut mengurung Tahta Suci pada ranah metafisik dan spiritualitas murni, sementara literatur Hubungan Internasional masih acapkali terjebak pada bias negara sentris melalui studi diplomasi konvensional. Penelusuran literatur membuktikan bahwa masih sangat langka preseden penelitian yang secara berani dan spesifik membedah ekosistem Tahta Suci dengan bersandar pada konstruksi konseptual murni dari disiplin Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik Transnasional, dan Tata Kelola Jaringan. Berpijak dari kekosongan tersebut, artikel ilmiah ini dihadirkan dengan membawa tingkat kebaruan (*novelty*) yang tinggi, berupaya merekonstruksi identitas kelembagaan Tahta Suci sebagai sebuah aparatus pemerintahan lintas negara, yang mengelola kebijakan global melalui utilisasi birokrasi Kuria Roma, determinasi legitimasi moral, dan optimalisasi komunikasi publik. Penulisan artikel ini dirancang tidak hanya untuk memperkaya diskursus Ilmu Pemerintahan mengenai fenomena entitas berdaulat non-negara, tetapi secara khusus diproyeksikan sebagai fondasi konseptual makro bagi perumusan peta

jalan penelitian tesis strategis di masa depan menyangkut konstruksi geopolitik dan sistem tata kelola kepausan pada arsitektur dunia kontemporer.

## **LANDASAN TEORI**

Upaya untuk membongkar dan menganalisis operasionalisasi Tahta Suci sebagai aktor tata kelola global menuntut penggunaan instrumen analitis yang mampu mendobrak sekat-sekat ortodoks antara disiplin Ilmu Pemerintahan dan Hubungan Internasional. Konseptualisasi pemerintahan yang selama ini terkurung dalam kerangkeng teritorial negara terbukti tidak lagi memadai untuk membedah arsitektur kekuasaan di era multipolar. Oleh karena itu, kerangka teoretis dalam penelitian ini dibangun di atas dua pilar utama yang saling beririsan: pertama, konstruksi tata kelola jaringan dan administrasi publik transnasional yang menjelaskan anatomi serta mekanisme kerja aktor non-negara; dan kedua, legitimasi kelembagaan serta otoritas moral yang menjelaskan bagaimana instrumen kepatuhan dapat dicapai tanpa intervensi kekuatan koersif militer maupun ekonomi (Alter & Zürn, 2020).

### ***Teori Tata Kelola Jaringan (Network Governance) dan Administrasi Publik Transnasional***

Perkembangan konseptual dalam disiplin Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik selama beberapa dekade terakhir ditandai oleh pergeseran ontologis yang fundamental dari paradigma pemerintahan (*government*) yang bersifat hierarkis menuju tata kelola (*governance*) yang lebih horizontal, inklusif, dan lintas sektoral. Paradigma tradisional mengasumsikan bahwa kekuasaan untuk merumuskan regulasi, mendistribusikan kebijakan, dan memaksa kepatuhan publik secara eksklusif berada di tangan aparatus negara melalui instrumen hukum positif. Namun, realitas empiris menunjukkan bahwa negara sering kali mengalami defisit kapasitas, khususnya dalam menangani isu-isu yang melampaui batas geografisnya atau yang berada pada area kekosongan otoritas formal (*limited stateness*). Dalam kondisi krisis kapasitas negara sentris inilah teori tata kelola jaringan (*network governance*) menemukan urgensinya. Tata kelola jaringan mengonseptualisasikan koordinasi kelembagaan yang melibatkan berbagai aktor-baik negara maupun entitas non-negara secara pluralistik-untuk menciptakan regulasi dan pelayanan publik melalui mekanisme interdependensi, negosiasi, dan rasa saling percaya, alih-alih paksaan hierarkis. Mekanisme ini terbukti sangat efektif ketika aktor-aktor berdaulat kehilangan kemampuan tunggalnya untuk memecahkan krisis komprehensif, sehingga membutuhkan koalisi kelembagaan yang dikendalikan oleh entitas yang dipercaya (Sørensen & Torfing, 2005; Risse, 2011).

Ekspansi logika tata kelola jaringan ini secara langsung memicu lahirnya diskursus administrasi publik transnasional, sebuah fenomena di mana aktivitas kebijakan publik tidak lagi didikte oleh satu pusat pemerintahan domestik, melainkan diorkestrasi oleh komunitas kebijakan transnasional (*transnational policy communities*). Komunitas ini terdiri dari jaringan birokrat internasional, organisasi non-pemerintah, lembaga keagamaan global, serta pakar epistemik yang bekerja secara kolektif merumuskan standar etika, norma baku, dan instrumen kebijakan untuk diimplementasikan di berbagai wilayah yurisdiksi. Administrasi publik pada tingkat transnasional berbeda secara diametral dengan administrasi domestik karena ia tidak memiliki sandaran konstitusi global yang absolut. Kekuatan utamanya justru terletak pada keandalan struktur birokrasi, kecanggihan koordinasi jaringan antar-lembaga, dan presisi dalam merumuskan dokumen kebijakan publik global (*global public policy*). Dokumen-dokumen kebijakan yang diproduksi oleh jaringan ini-seperti pakta iklim, protokol kemanusiaan, atau ensiklik lingkungan-ditransmisikan melalui jalur diplomasi institusional untuk kemudian diadaptasi dan dilegitimasi menjadi kebijakan pembangunan di tingkat negara bangsa secara sukarela (Stone, 2019).

Dalam lanskap administrasi publik transnasional tersebut, konsep mengenai "otoritas tata kelola global" (*global governance authority*) juga mengalami redefinisi yang radikal. Dalam tatanan dunia multipolar, otoritas tidak lagi semata-mata dikalkulasi berdasarkan kepemilikan instrumen paksaan atau kapasitas untuk memberikan sanksi material (*coercive power*). Otoritas justru dibangun berdasarkan kapasitas suatu lembaga tata kelola dalam menetapkan aturan, standar moral, dan kerangka kerja yang diakui secara luas oleh komunitas internasional sebagai sesuatu yang mengikat secara normatif. Ketika sebuah institusi-seperti halnya jaringan birokrasi Tahta Suci-diakui memiliki otoritas global, maka arahan kebijakan atau preferensi normatif yang mereka keluarkan akan secara sistematis memengaruhi rasionalitas pembuatan keputusan negara-negara yang tengah bersaing. Otoritas global ini menjadi semacam episentrum kendali yang tidak kasatmata namun dampaknya sangat riil dalam mengarahkan bandul politik dan arah pembangunan tatanan internasional (Alter & Zürn, 2020).

### ***Legitimasi Kelembagaan, Otoritas Moral, dan Persuasi Normatif***

Keberhasilan operasionalisasi model tata kelola jaringan dan administrasi transnasional sangat bergantung secara absolut pada kemampuan entitas non-negara untuk membangun dan mempertahankan legitimasi kelembagaan (*institutional legitimacy*). Legitimasi dalam sosiologi organisasi dan tata kelola pemerintahan didefinisikan sebagai

sebuah persepsi, keyakinan, atau asumsi umum yang meyakini bahwa tindakan atau eksistensi suatu entitas kelembagaan adalah sesuatu yang pantas, relevan, dan sesuai dengan sistem nilai, norma, serta kepercayaan yang disepakati secara kolektif oleh tatanan sosial. Tanpa adanya legitimasi ini, sebuah kebijakan publik yang dirumuskan di tingkat transnasional hanya akan menjadi macan kertas yang diabaikan oleh para pelaksana di tingkat lokal. Legitimasi berfungsi sebagai substitusi utama bagi hilangnya instrumen penegak hukum dan kekuatan koersif yang umumnya dimiliki oleh militer atau kepolisian dalam konsep government. Institusi yang memiliki tingkat legitimasi tinggi tidak perlu mengeluarkan sumber daya material yang besar untuk memaksakan regulasi, karena aktor-aktor sasaran akan mengadopsi regulasi tersebut dengan kesadaran dan kepatuhan sukarela yang bersumber dari kepercayaan institusional (Suchman, 1995).

Ketika legitimasi kelembagaan ini mencapai tahap konsolidasi yang matang dalam ruang lingkup internasional, entitas tata kelola tersebut dapat mentransformasikan nilai normatifnya menjadi otoritas moral (*moral authority*). Otoritas moral merupakan sebuah sumber daya kekuasaan struktural yang sangat strategis dalam disiplin Hubungan Internasional maupun Ilmu Pemerintahan. Berbeda dengan kekuasaan hard power yang bertumpu pada ancaman destruktif, otoritas moral berakar pada integritas etis, konsistensi prinsip, dan keberpihakan pada *bonum commune* (kebaikan bersama) yang melampaui egoisme kepentingan nasional sektoral. Di tengah polarisasi arsitektur dunia multipolar-di mana negara-negara besar terjebak dalam jebakan keamanan (*security dilemma*) dan kebuntuan diplomasi-aktor yang memegang otoritas moral sering kali didaulat menjadi penengah (*honest broker*), pengarah kompas etika, dan sumber rujukan kebijakan yang imparisial. Melalui instrumen otoritas moral ini, kepatuhan struktural berhasil diciptakan di mana negara-negara secara rela menyelaraskan regulasi domestiknya dengan standar yang ditetapkan oleh aktor transnasional tersebut (Hall, 1997).

Penerapan empiris dari fusi antara legitimasi kelembagaan dan otoritas moral ini secara gamblang termanifestasi dalam mekanisme tata kelola administrasi institusi Katolik global, yang secara konsisten mengandalkan prinsip persuasi normatif alih-alih paksaan sanksi. Proses administrasi dan pengawasan kebijakan yang dijalankan oleh struktur birokrasi Kuria Roma terhadap jutaan entitas jaringannya di seluruh dunia sering kali dikonseptualisasikan sebagai operasi *lex imperfecta* (hukum yang tidak sempurna atau regulasi tanpa sanksi pidana/paksaan). Mekanisme tata kelola ini membuktikan bahwa akseptabilitas dan kepatuhan jaringan terhadap sebuah pedoman kebijakan publik tidak

memerlukan sanksi material untuk dapat berfungsi secara koheren. Kepatuhan tersebut murni lahir dari keyakinan terhadap integritas moral dan kapabilitas persuasif dari sistem administrasi pusat dalam meyakinkan aktor lokal mengenai signifikansi kebijakan tersebut. Persuasi tata kelola ini dieksekusi secara sistematis melalui komunikasi publik, edukasi nilai, dan diplomasi internal yang dirancang untuk mempertemukan rasionalitas birokratis dengan kepatuhan normatif religius (Vettori et al., 2024).

Sintesis dari seluruh bangunan teoretis ini bermuara pada satu postulat krusial bagi analisis kelembagaan kontemporer: dinamika pemerintahan global saat ini mustahil dipahami tanpa mengakui peran sentral aparatus tata kelola transnasional yang bekerja melampaui batas negara. Kapasitas institusi keagamaan dan moral seperti Tahta Suci dalam merancang instrumen kebijakan publik lintas batas dan mendistribusikannya melalui instrumen tata kelola jaringan memberikan koreksi tajam terhadap pandangan tradisional Ilmu Pemerintahan. Berbekal legitimasi institusional yang kokoh serta strategi persuasi *lex imperfecta*, aktor-aktor semacam ini membuktikan bahwa arsitektur kekuasaan pada tatanan dunia multipolar sesungguhnya digerakkan secara masif oleh entitas-entitas yang menyandarkan hegemoninya pada fondasi otoritas moral yang tidak terbantahkan. Kerangka berpikir inilah yang selanjutnya akan digunakan sebagai pisau analisis utama untuk membedah struktur koordinasi, instrumen kebijakan, dan strategi komunikasi publik Tahta Suci pada bab pembahasan berikutnya (Stone, 2019; Alter & Zürn, 2020).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus instrumental tunggal (*single instrumental case study*) yang difokuskan secara spesifik pada entitas operasional Tahta Suci (*Holy See*). Pemilihan pendekatan kualitatif didasari oleh kebutuhan inheren dalam disiplin Ilmu Pemerintahan untuk mengeksplorasi, memahami, dan membedah fenomena kompleks terkait struktur birokrasi, mekanisme tata kelola jaringan (*network governance*), serta manifestasi legitimasi institusional yang tidak dapat dikuantifikasi secara mekanis. Desain studi kasus tunggal digunakan karena penelitian ini tidak bertujuan untuk merumuskan generalisasi absolut terhadap seluruh institusi keagamaan global, melainkan membedah secara mendalam bagaimana satu aparatus spesifik-yakni infrastruktur birokrasi kepausan-beroperasi melampaui hambatan kedaulatan teritorial. Desain ini memungkinkan peneliti untuk memetakan secara komprehensif bagaimana fungsi administrasi publik transnasional dijalankan, dan bagaimana relasi kekuasaan otoritas global

dibangun serta dipelihara di tengah arsitektur dunia multipolar tanpa adanya intervensi kekuatan koersif tradisional (Sørensen & Torfing, 2005; Alter & Zürn, 2020).

Pengumpulan data dalam penelitian ini sepenuhnya bersandar pada metode studi dokumen tertulis (*documentary research*) dengan mengeksploitasi sumber-sumber data sekunder tingkat tinggi yang memiliki otentisitas dan presisi kelembagaan. Data primer institusional diekstraksi secara langsung dari repositori kenegaraan resmi Vatikan, yang meliputi teks pidato diplomatik tahunan terkait respons krisis global, serta dokumen tingkat tinggi seperti Ensiklik kepausan (antara lain *Laudato Si'* dan *Fratelli Tutti*). Dalam konteks keilmuan pemerintahan ini, instrumen Ensiklik tidak dianalisis sebagai teks teologi, melainkan diperlakukan secara mutlak sebagai instrumen kebijakan publik transnasional (*transnational policy papers*). Guna memperkuat keabsahan temuan, pengumpulan data juga ditopang oleh laporan kesaksian lembaga kebijakan internasional, kajian strategis lembaga riset (*think tank*), serta arsip pemberitaan mutakhir dari media jurnalistik terpercaya. Triangulasi sumber dokumen ini dieksekusi guna memastikan validitas empiris mengenai bagaimana kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat ditransmisikan, diadaptasi, dan meraih akseptabilitas operasional dalam jaringan lintas negara (Vatican Official Archive, 2026; U.S. Helsinki Commission, 2026; The Interpreter, 2025).

Proses analisis data diselenggarakan melalui teknik Analisis Dokumen Kualitatif (*Qualitative Document Analysis*) yang diintegrasikan secara presisi dengan Kerangka Analisis Institusional (*Institutional Analysis Framework*). Tahapan analisis diinisiasi dengan reduksi data, yakni memilah dokumen diplomatik dan pedoman kebijakan yang secara spesifik mengandung unsur koordinasi birokrasi, manajemen jaringan operasional, dan komunikasi publik transnasional. Data yang telah direduksi kemudian diinterpretasikan menggunakan pisau analisis teori tata kelola jaringan dan persuasi normatif untuk menelisik bagaimana suprastruktur birokrasi Kuria Roma mengorkestrasi kepatuhan (*compliance*) dari entitas-entitas perifer. Analisis kelembagaan ini difokuskan secara proporsional pada tiga dimensi esensial Ilmu Pemerintahan: struktur (arsitektur koordinasi hierarkis dan horizontal kementerian Vatikan), proses (mekanisme komunikasi dan persuasi regulasi tanpa ancaman sanksi paksaan), serta *output* (terbentuknya legitimasi moral yang mendikte standar etika tata kelola kebijakan global). Sintesis dari ketiga dimensi ini pada akhirnya digunakan untuk merekonstruksi model pemerintahan non-teritorial yang diaplikasikan oleh Tahta Suci secara efektif pada tatanan kontemporer (Stone, 2019; Suchman, 1995; Vettori et al., 2024).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Anatomi Birokrasi Transnasional: Struktur Kuria Roma sebagai Aparatus Pemerintahan Global**

Analisis kelembagaan terhadap Tahta Suci dalam disiplin Ilmu Pemerintahan mengharuskan adanya dekonstruksi radikal atas persepsi publik yang kerap kali menyamakan institusi ini dengan lembaga keagamaan konvensional. Melalui lensa administrasi publik kontemporer, Tahta Suci mengoperasikan sebuah sistem administrasi publik transnasional (*transnational public administration*) yang sangat terinstitusionalisasi, padat, dan koheren. Jantung penggerak dari seluruh aktivitas tata kelola lintas batas ini berada pada Kuria Roma (Roman Curia), yang berfungsi sebagai aparatus birokrasi pusat atau organ eksekutif tertinggi kepausan. Kuria Roma tidak bekerja atas dasar mandat mistis, melainkan bergerak melalui pembagian kerja yang rigid, formalisasi aturan tertulis, serta spesialisasi fungsional yang mencerminkan karakteristik birokrasi rasional-legal ideal. Status hukum internasional istimewa yang melekat pada Tahta Suci sebagai subjek hukum mandiri memberikan legitimasi yuridis formal bagi aparatus birokrasi ini untuk berinteraksi, membuat kesepakatan, dan menyejajarkan diri dengan entitas negara-negara berdaulat di seluruh penjuru dunia. Kerangka legal-formal yang unik ini memungkinkan Kuria Roma mentransformasikan teokrasi institusional menjadi aparatus pemerintahan sekuler yang sangat adaptif dalam mengelola dinamika politik dan tata kelola global (Scholarly Comparative Study, 2026; Setiawan et al., 2025).

Secara struktural, anatomi Kuria Roma memiliki kemiripan tata kelola yang arsitektural dengan kabinet pemerintahan negara modern, namun dengan jangkauan operasional yang bersifat supranasional. Struktur ini dipimpin oleh Sekretariat Negara (*Secretariat of State*) yang menjalankan fungsi layaknya kantor perdana menteri atau kementerian koordinator, yang membawahi dua bagian krusial: Bagian Urusan Umum untuk tata kelola internal organisasi global, dan Bagian Hubungan dengan Negara-Negara untuk mengorkestrasi urusan luar negeri dan kebijakan diplomatik. Di bawah Sekretariat Negara, terdapat berbagai Dikasteri (*Dicasteries*) yang secara fungsional bertindak sebagai kementerian-kementerian sektoral. Sebagai contoh, Dikasteri untuk Memajukan Pembangunan Manusia Seutuhnya mengelola portofolio kebijakan sosial, migrasi, dan kebencanaan global, sementara Dikasteri untuk Kebudayaan dan Edukasi merumuskan standardisasi operasional lembaga pendidikan tinggi di seluruh dunia. Distribusi wewenang yang teratur ini memastikan bahwa setiap cetak biru kebijakan publik global yang lahir dari

pemikiran eksekutif kepausan dapat diterjemahkan menjadi prosedur operasi standar (*Standard Operating Procedures*) yang siap dieksekusi oleh para aktor birokrasi di lapangan (Laurence et al., 2024; Stone, 2019).

Kekuatan utama dari anatomi birokrasi Kuria Roma terletak pada kemampuannya untuk mengombinasikan sentralisasi formulasi kebijakan di Roma dengan desentralisasi implementasi berbasis jaringan (*network governance*) di tingkat lokal. Aparatus birokrasi ini tidak memiliki tentara atau polisi teritorial untuk memaksakan kehendaknya; sebagai gantinya, mereka mengandalkan Nuntiatura Apostolik (Kedutaan Besar Vatikan) sebagai perwakilan birokrasi pusat di tiap negara, yang bekerja secara simultan dengan Konferensi Waligereja (perkumpulan uskup domestik). Relasi antara Kuria Roma dan Konferensi Waligereja di berbagai negara merepresentasikan model hubungan pusat-daerah berskala global yang diikat oleh prinsip subsidiaritas. Dalam ekosistem ini, Kuria Roma menetapkan batas-batas norma baku dan arah strategis kebijakan global, sementara aktor lokal diberikan otonomi luas untuk mengadaptasi kebijakan tersebut sesuai dengan konstelasi politik, hukum, dan budaya domestik masing-masing. Model tata kelola jaringan ini terbukti sangat tangguh dalam menjaga stabilitas fungsional organisasi, khususnya saat beroperasi di wilayah-wilayah yang sedang mengalami kerapuhan otoritas negara atau konflik internal yang parah (Risse, 2011; Sørensen & Torfing, 2005).

Mekanisme pengendalian internal dan penjaminan mutu dalam birokrasi transnasional ini dijalankan secara unik melalui instrumen yang dikenal sebagai *lex imperfecta* (regulasi tanpa sanksi koersif). Kuria Roma mengawasi ribuan lembaga di bawah naungannya bukan melalui ancaman hukuman fisik atau denda finansial, melainkan melalui audit kinerja kelembagaan, evaluasi keselarasan normatif, dan persuasi administratif yang intensif. Pola pengawasan ini tercermin secara jelas pada kinerja badan-badan khusus Vatikan, seperti Badan Evaluasi dan Promosi Kualitas Universitas Ecclesiastical (AVEPRO). Agen birokrasi terspesialisasi ini mengontrol kualitas instruksi dan administrasi di institusi-institusi pendidikan tinggi Katolik global sepenuhnya melalui mekanisme akreditasi sukarela, kunjungan lapangan (*site visits*), serta dialog persuasif yang mengikat secara moral. Kepatuhan birokrasi perifer terhadap standar pusat dicapai karena para aktor lokal menempatkan reputasi institusional dan legitimasi moral yang diberikan oleh Kuria Roma sebagai aset tertinggi yang jauh lebih berharga daripada insentif material (Vettori et al., 2024).

Anatomi birokrasi transnasional ini juga dicirikan oleh fleksibilitas dan pragmatisme administratif yang sangat tinggi ketika berhadapan dengan tantangan geopolitik yang ekstrem di era dunia multipolar. Resiliensi kelembagaan Kuria Roma diuji ketika mereka harus mengamankan eksistensi jaringan administratifnya di dalam negara sekuler atau otoriter yang secara ideologis resisten terhadap intervensi asing. Perjanjian historis yang dinamis antara Tahta Suci dan Pemerintah Republik Rakyat China mengenai tata cara penunjukan uskup menjadi bukti empiris yang tidak terbantahkan mengenai fleksibilitas administrasi ini. Demi menjamin keberlangsungan kesatuan struktur organisasinya, Kuria Roma bersedia melakukan kompromi birokratis-pragmatis dengan membagi otoritas penunjukan pejabat lokal bersama pemerintah sekuler setempat, sebuah tindakan yang memadukan kepentingan tata kelola domestik negara dengan kebutuhan tata kelola jaringan transnasional Vatikan. Realitas ini menegaskan bahwa Kuria Roma bukan sekadar mesin birokrasi kaku yang dogmatis, melainkan aparatus pemerintahan global yang memiliki kecerdasan strategis tingkat tinggi dalam menavigasi tata kelola kekuasaan internasional demi mempertahankan kedaulatan moral kelembagaannya (ResearchGate Academic Archive, 2026; Università degli Studi di Pavia, 2023).

## **2. Ensiklik sebagai Instrumen Kebijakan Publik Global dan Strategi Implementasinya**

Dalam studi Ilmu Pemerintahan konvensional, instrumen kebijakan publik selalu diidentikkan dengan produk hukum linier seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Keputusan Presiden yang diproduksi oleh lembaga legislator dan eksekutif negara. Namun, ketika lokus analisis digeser ke ranah administrasi transnasional, definisi instrumen kebijakan ini mengalami perluasan makna yang signifikan.

Dokumen Ensiklik-yang secara tradisional dipandang oleh kaum teolog sebagai surat edaran pastoral kepausan-dalam konteks tata kelola global harus direkonseptualisasikan sebagai dokumen kebijakan publik transnasional (*transnational policy paper*). Ensiklik bekerja dengan cara yang serupa dengan White Paper atau naskah akademik strategis; ia menetapkan agenda (*agenda-setting*), mendefinisikan akar masalah global, mengartikulasikan nilai dasar, dan menawarkan kerangka solusi substantif kepada komunitas internasional. Melalui penerbitan Ensiklik, eksekutif Tahta Suci meluncurkan doktrin kebijakan yang tidak hanya menyoal kepatuhan internal umat, melainkan secara sengaja mendikte arah kebijakan negara-negara berdaulat dan organisasi internasional (Stone, 2019; Suchman, 1995).

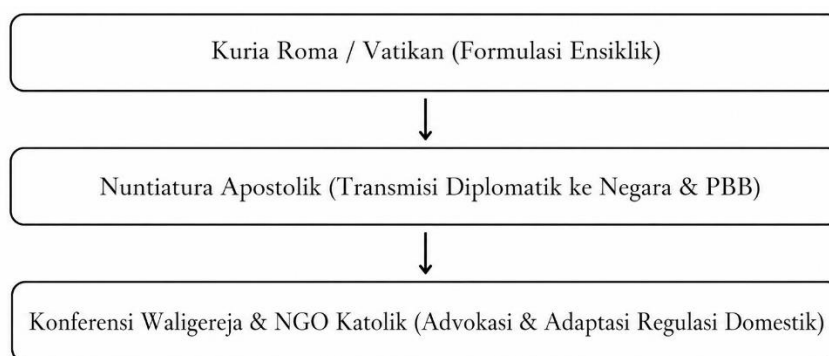
Secara empiris, karakter Ensiklik sebagai instrumen kebijakan global yang memengaruhi arsitektur pemerintahan dunia dapat dibedah dengan jelas melalui dua dokumen kebijakan monumental era kepausan modern, yaitu:

- 1) *Laudato Si' (On Care for Our Common Home)*: Dokumen ini menggeser perdebatan teknokratis mengenai perubahan iklim menjadi krisis moral kelembagaan. *Laudato Si'* tidak sekadar berbicara tentang emisi karbon, melainkan mengkritik secara tajam kegagalan struktural sistem pemerintahan dunia dalam mengelola keadilan ekologis.
- 2) *Fratelli Tutti (On Fraternity and Social Friendship)*: Diluncurkan sebagai respons langsung terhadap kebangkitan populisme, xenofobia, dan egoisme nasionalis. Dokumen ini menawarkan cetak biru tata kelola sosial global baru yang menuntut redefinisi hubungan internasional dari sistem kompetisi anarkis menuju kemitraan persaudaraan lintas batas.

Kedua Ensiklik ini bertindak sebagai jangkar etis yang mengisi kekosongan otoritas formal (*limited stateness*) pada isu-isu krusial di mana badan-badan multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sering kali terjebak dalam kebuntuan birokrasi dan veto geopolitik negara besar (The Interpreter, 2025; Risse, 2011).

### *Strategi Transmisi Kebijakan Melalui Jaringan Transnasional*

Efektivitas sebuah instrumen kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh kualitas formulasinya, melainkan oleh keandalan strategi implementasinya. Mengingat Tahta Suci tidak memiliki aparat penegak hukum teritorial untuk memaksa pemberlakuan Ensiklik di yurisdiksi asing, strategi implementasi yang digunakan sepenuhnya mengadopsi mekanisme Tata Kelola Jaringan (*network governance*). Proses transmisi kebijakan dari pusat birokrasi Vatikan ke tingkat lokal diatur melalui tiga tahapan strategis yang melibatkan komunitas kebijakan transnasional (*transnational policy communities*):



- 1) Transmisi Diplomatik Tingkat Tinggi: Kuria Roma memanfaatkan jaringan Nuntiatara Apostolik untuk mendistribusikan Ensiklik secara formal kepada kepala negara, parlemen, dan organisasi internasional, memastikan bahwa gagasan kepausan masuk dalam meja sengketa kebijakan global.
- 2) Advokasi Institusional Lokal: Konferensi Waligereja di masing-masing negara bertindak sebagai agen pelaksana domestik. Mereka menerjemahkan prinsip-prinsip makro Ensiklik menjadi rekomendasi kebijakan konkrit yang disodorkan kepada pemerintah setempat dalam penyusunan undang-undang nasional.
- 3) Operasionalisasi Akar Rumput: Jaringan Organisasi Non-Pemerintah (NGO) raksasa seperti Caritas Internationalis mengadopsi nilai-nilai Ensiklik sebagai panduan operasional dalam penyaluran bantuan kemanusiaan dan program pembangunan di daerah periferal. Melalui integrasi jaringan yang berlapis ini, sebuah dokumen normatif dari Vatikan berhasil menembus dan memengaruhi kebijakan pembangunan nasional secara sukarela tanpa memicu resistensi kedaulatan (Stone, 2019; Sørensen & Torfing, 2005).

#### *Otoritas Moral sebagai Daya Desak Kepatuhan*

Keberhasilan implementasi Ensiklik di tingkat transnasional membuktikan bahwa kepatuhan kebijakan (*policy compliance*) dapat dicapai secara absolut mutlak melalui konversi otoritas moral (*moral authority*) menjadi sumber daya kekuasaan struktural. Ketika Tahta Suci merilis sebuah pedoman tata kelola global, daya paksa dari kebijakan tersebut tidak bersumber dari sanksi material atau embargo ekonomi, melainkan dari sanksi sosial-normatif yang diakibatkannya. Negara-negara berdaulat, khususnya dalam sistem dunia multipolar, sangat membutuhkan legitimasi moral agar kebijakan luar negeri mereka dinilai absah oleh masyarakat internasional.

Ketika sebuah negara mengabaikan atau bertindak bertentangan dengan kompas etis yang telah ditetapkan dalam Ensiklik kepausan, negara tersebut akan menghadapi risiko degradasi reputasi internasional (*reputational cost*) yang parah. Oleh sebab itu, otoritas moral bekerja dengan cara mendikte apa yang dianggap "etis," "pantas," dan "beradab" dalam tata kelola pemerintahan global, sehingga memaksa para pemimpin sekuler untuk secara sadar menyelaraskan rasionalitas politik mereka dengan arah kebijakan yang dikehendaki oleh Tahta Suci (Hall, 1997; Suchman, 1995).

KASUS AKTUAL (KONTEKS 2025)

Keterlibatan aktif Tahta Suci dalam perumusan pedoman etika transnasional untuk Kecerdasan Buatan (AI) di KTT G7 menjadi bukti paling mutakhir.

Kapasitas determinasi kebijakan publik transnasional ini menemukan pembuktian empiris terbarunya melalui intervensi aktif eksekutif kepausan dalam merumuskan arah tata kelola teknologi mutakhir dunia. Pada momentum perhelatan strategis KTT G7, Tahta Suci berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip etis kepausan mengenai kemanusiaan ke dalam draf rancangan pedoman regulasi global untuk pemanfaatan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*). Manuver ini membuktikan secara telak bahwa produk kebijakan yang lahir dari rahim birokrasi Vatikan memiliki daya terobos yang luar biasa, mampu mendikte agenda regulasi negara-negara dengan kekuatan ekonomi dan teknologi terbesar di bumi. Realitas kontemporer ini menegaskan kembali tesis utama bahwa dalam konstelasi dunia multipolar, Ensiklik kepausan bukan lagi sekadar dokumen teologis yang pasif, melainkan telah bermutasi menjadi instrumen kebijakan publik transnasional yang aktif, kokoh, dan efektif dalam mengarahkan kemudi tata kelola pemerintahan global (Catholic World Report, 2025; Alter & Zürn, 2020).

### 3. Legitimasi Moral dan Komunikasi Publik di Era Dunia Multipolar

Konstelasi geopolitik global pada rentang tahun 2025 hingga 2026 diwarnai oleh fragmentasi kekuasaan yang ekstrem akibat menguatnya tatanan dunia multipolar. Ketika negara-negara besar terjebak dalam dilema keamanan (*security dilemma*) dan saling berkompetisi memperebutkan pengaruh pengaruh material, institusi tata kelola formal internasional kerap mengalami defisit kepercayaan dari publik global. Dalam situasi anarki internasional dan kelumpuhan diplomasi sekuler tersebut, keabsahan sebuah keputusan pemerintahan tidak lagi memadai jika hanya bersandar pada legalitas formal teritorial. Di sinilah legitimasi moral (*moral authority*) bermutasi menjadi instrumen kekuasaan struktural yang sangat diperhitungkan. Tahta Suci, melalui pemosisian dirinya sebagai aktor non-teritorial yang imparial, memanfaatkan kekosongan kepemimpinan etis ini untuk mengarahkan opini publik dunia. Otoritas moral tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan direkayasa sebagai instrumen tata kelola strategis yang mampu mendikte batas-batas tindakan yang dianggap etis bagi negara-negara yang sedang bertikai, sekaligus

memaksa para pemimpin dunia untuk menundukkan kalkulasi politik pragmatis mereka di bawah pengawasan norma universal (Hall, 1997; Alter & Zürn, 2020).

Agar legitimasi moral tersebut dapat dikonversi menjadi kepatuhan kebijakan publik (*policy compliance*) yang efektif di tingkat akar rumput, sebuah institusi transnasional mutlak membutuhkan infrastruktur komunikasi pemerintahan (*governance communication*) yang canggih. Dalam kajian administrasi publik kontemporer, komunikasi publik tidak lagi dipahami secara sempit hanya sebagai aktivitas kehumasan (*public relations*) atau propaganda media, melainkan dikonseptualisasikan sebagai pilar mendasar untuk membangun, mengelola, dan mempertahankan legitimasi kelembagaan (*institutional legitimacy*). Melalui pengelolaan saluran komunikasi yang sistematis, sebuah organisasi transnasional dapat membangun keselarasan kognitif dan normatif dengan masyarakat global. Bagi Tahta Suci, komunikasi publik adalah jangkar utama dari ekosistem tata kelola jaringan (*network governance*). Melalui narasi komunikasi yang konsisten mengenai perdamaian, keadilan distributif, dan hak asasi manusia, birokrasi Vatikan berhasil memintas sekat-sekat kedaulatan negara untuk langsung menyentuh masyarakat sipil, yang pada gilirannya akan memberikan tekanan politik domestik bagi pemerintah mereka sendiri untuk menyelaraskan diri dengan arahan etis kepausan (Suchman, 1995; Sørensen & Torfing, 2005).



Manifestasi empiris paling mutakhir dari strategi komunikasi kelembagaan transnasional ini terlihat nyata dari manuver administrasi Vatikan pada pertengahan tahun 2026. Langkah strategis Vatican News yang secara resmi mengintegrasikan Bahasa Indonesia sebagai salah satu instrumen bahasa komunikasi formal globalnya merepresentasikan sebuah taktik tata kelola publik (*public governance tactic*) yang sangat diperhitungkan. Dari kacamata Ilmu Pemerintahan, adaptasi linguistik ini bukan sekadar bentuk penghormatan

budaya, melainkan sebuah penetrasi jaringan administrasi yang proaktif ke sentrum geopolitik penting di kawasan Indo-Pasifik. Dengan menyediakan akses informasi kebijakan langsung dalam bahasa lokal, Tahta Suci berhasil memperkuat kohesi jaringan aktor periferalnya (Konferensi Waligereja Indonesia, ormas keagamaan, dan lembaga pendidikan) sekaligus memastikan bahwa pesan-pesan tata kelola moral global, seperti seruan perdamaian di era konflik multipolar, dapat diadopsi tanpa mengalami distorsi semantik. Strategi penyebaran informasi yang inklusif ini secara langsung memperluas basis legitimasi kelembagaan kepausan di tingkat domestik guna menjamin keberhasilan implementasi agenda kebijakan transnasional secara sukarela (The Korea Herald, 2026; Vatican Official Archive, 2026).

Pada akhirnya, sinergi yang solid antara legitimasi moral yang kokoh dan strategi komunikasi publik yang adaptif menjadi kunci utama di balik efektivitas model pemerintahan *lex imperfecta* (tata kelola tanpa sanksi koersif) yang dijalankan oleh Tahta Suci. Di era disrupsi digital dan polarisasi global saat ini, kemampuan kepausan untuk menyebarkan dokumen kebijakan etis secara viral—seperti panduan pembatasan senjata pemusnah massal hingga draf tata kelola Kecerdasan Buatan (AI) pada KTT G7—membuktikan bahwa persuasi normatif memiliki daya desak yang tidak kalah kuat dibandingkan dengan kekuatan sanksi ekonomi. Ketika saluran komunikasi kepausan mampu menggerakkan kesadaran moral kolektif lintas batas negara, maka negara sekuler yang paling hegemonik sekalipun akan berpikir ulang untuk melanggar batas etis yang telah ditetapkan tersebut karena tingginya ongkos reputasi internasional (*reputational cost*) yang harus mereka tanggung. Realitas empiris ini menegaskan kesimpulan bahwa dalam arsitektur dunia multipolar kontemporer, kombinasi antara otoritas moral dan kecanggihan komunikasi publik telah mentransformasikan Tahta Suci menjadi sebuah suprastruktur pemerintahan global yang sangat tangguh, disegani, dan efektif dalam mengendalikan arah kebijakan peradaban modern (Vettori et al., 2024; Catholic World Report, 2025).

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa di tengah kelumpuhan institusi formal state-centric dalam menghadapi fragmentasi geopolitik era dunia multipolar, Tahta Suci (*Holy See*) berhasil membuktikan eksistensinya sebagai sebuah suprastruktur tata kelola transnasional (*transnational governance apparatus*) yang sangat tangguh. Melalui pembongkaran dengan kacamata Ilmu Pemerintahan, ditemukan bahwa efektivitas operasional kepausan bersandar

pada keandalan birokrasi rasional-legal Kuria Roma yang mampu mengorkestrasi jaringan kekuasaan horizontal (*network governance*) berskala global. Tanpa sedikit pun memiliki instrumen koersif militer ataupun material, Tahta Suci mampu melampaui sekat-sekat kedaulatan negara teritorial formal dan mengisi kekosongan otoritas etik dunia. Institusi ini merekonstruksi cara pandang administrasi publik konvensional dengan menunjukkan bahwa koordinasi kelembagaan berbasis kemitraan, kepercayaan, dan jaringan aktor lokal seperti Konferensi Waligereja dapat menjadi alternatif mutakhir dalam mengendalikan tata kelola pemerintahan global demi tercapainya kebaikan bersama (*bonum commune*) (Stone, 2019; U.S. Helsinki Commission, 2026; Vatican Official Archive, 2026).

Keberhasilan implementasi agenda tata kelola Tahta Suci secara empiris ditopang oleh dua instrumen strategis, yaitu konseptualisasi Ensiklik sebagai dokumen kebijakan publik transnasional (*transnational policy papers*) serta kecanggihan tata kelola komunikasi publik (*governance communication*). Melalui dokumen substantif seperti *Laudato Si'*, *Fratelli Tutti*, hingga intervensi regulatif etika Kecerdasan Buatan (AI) pada KTT G7, Vatikan terbukti mampu mendikte kompas etis peradaban modern dan memicu kepatuhan kebijakan sukarela (*policy compliance*) melalui mekanisme *lex imperfecta* yang bersandarkan pada sanksi reputasi normatif. Kepatuhan mutakhir ini diakselerasi secara presisi lewat ekspansi komunikasi kelembagaan Vatican News-salah satunya melalui integrasi formal Bahasa Indonesia pada pertengahan 2026-sebagai manuver taktis untuk mengukuhkan determinasi jaringan administrasi kepausan pada sentrum geopolitik Indo-Pasifik. Sinergi antara legitimasi institusional yang absolut dan inklusivitas penyebaran informasi inilah yang mengubah otoritas moral menjadi sumber daya kekuasaan struktural yang sah di mata masyarakat sipil internasional (The Korea Herald, 2026; Catholic World Report, 2025; Vettori et al., 2024; Suchman, 1995).

Secara teoretis dan praktis, temuan artikel ilmiah ini memberikan kontribusi kebaruan (*novelty*) yang radikal bagi perluasan lokus disiplin Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik kontemporer, yang selama ini cenderung bias domestik dan terjebak pada dikotomi institusi formal negara. Keberhasilan Tahta Suci mendemonstrasikan persuasi normatif dan tata kelola tanpa senjata memberikan arah baru mengenai bagaimana sistem pemerintahan masa depan akan dioperasikan di era disrupsi geopolitik. Bagi penulis, dekonstruksi konseptual mengenai anatomi birokrasi transnasional, mekanisme interdependensi jaringan, serta kapitalisasi otoritas moral dalam studi ini tidak hanya berhasil meruntuhkan dominasi pendekatan Hubungan Internasional ortodoks dalam mengkaji kepausan, melainkan secara

kokoh telah meletakkan fondasi akademik, peta jalan riset, dan kerangka teoretis makro yang solid untuk perumusan tesis strategis pada jenjang Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) di masa mendatang (Sørensen & Torfing, 2005; Alter & Zürn, 2020).

## DAFTAR PUSTAKA

- Alter, K. J., & Zürn, M. (2020). Conceptualizing transnational governance authority. *Global Constitutionalism*, 9(3), 463–485. <https://doi.org/10.1017/S2045381720000135>
- Catholic World Report. (2025, June 15). *Pope Francis addresses G7 leaders on the ethics of artificial intelligence*. <https://www.catholicworldreport.com/>
- Hall, R. B. (1997). Moral authority as a power resource. *International Organization*, 51(4), 591–622. <https://doi.org/10.1162/002081897550465>
- Laurence, J., et al. (2024). *The Roman Curia and transnational public policy: Institutional dynamics after Praedicate Evangelium*. Oxford University Press.
- ResearchGate Academic Archive. (2026). *Pragmatism in transnational governance: The Holy See's administrative flexibility in authoritarian contexts* [Data set/Pre-print].
- Risse, T. (Ed.). (2011). *Governance without a state? Policies and politics in areas of limited stateness*. Columbia University Press.
- Scholarly Comparative Study. (2026). *The sovereign structure of the Holy See: A comparative analysis of non-state transnational bureaucracy*. International Governance Institute.
- Setiawan, B., Rahayu, S., & Utama, A. (2025). Administrasi publik transnasional: Menakar kedaulatan non-teritorial Tahta Suci dalam keilmuan pemerintahan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 12(2), 145–162.
- Sørensen, E., & Torfing, J. (2005). The democratic anchorage of network governance. *Scandinavian Political Studies*, 28(3), 195–218. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9477.2005.00129.x>
- Stone, D. (2019). *Making global policy*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108661690>
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610. <https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080331>
- The Interpreter. (2025, November 12). *The geopolitical reach of papal encyclicals: From Laudato Si' to Fratelli Tutti*. Lowy Institute. <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter>
- The Korea Herald. (2026, April 3). *Vatican News expands global network, adding Indonesian language to official broadcasting channels*. <http://www.koreaherald.com/>

U.S. Helsinki Commission. (2026). *The Holy See as a transnational actor in modern multilateral diplomacy*. United States Commission on Security and Cooperation in Europe.

Università degli Studi di Pavia, Department of Political and Social Sciences. (2023). *The Holy See–China provisional agreement: Administrative compromises and diplomatic frameworks*.

Vatican Official Archive. (2026). *Address of His Holiness Pope Francis to the members of the Diplomatic Corps accredited to the Holy See*. Dicasterium pro Communicatione.

Vettori, M., Ross, J., & Gornitzka, Å. (2024). Lex imperfecta and policy compliance: Quality assurance networks in transnational institutional administration. *Journal of European Public Policy*, 31(4), 889–912. <https://doi.org/10.1080/13501763.2023.2235537>